

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DISTRIK ABEPURA, KOTA
JAYAPURA, PROVINSI PAPUA**

Olivia Sarlota Gebriella Sombuk
NPP. 31.1050

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: sombukolivia@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaika, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Poverty is a serious issue faced by many regions in Indonesia, including the Abepura District in Jayapura City, Papua Province. To address this problem, the government has implemented the Family Hope Program (PKH), which aims to improve community welfare through financial assistance and support. Although this program has been running for several years, its effectiveness and impact on poverty alleviation in the Abepura District have not been comprehensively evaluated. This study aims to evaluate the PKH policy in the Abepura District, identify the successes and challenges encountered, and provide recommendations to improve the program's effectiveness in the future. **Purpose:** This research aims to evaluate the effectiveness of the Family Hope Program policy in alleviating poverty in Abepura District, Jayapura City, Papua Province. **Method:** The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with various stakeholders related to the program, direct observation, and analysis of documents related to PKH implementation. **Result:** The research results show that although PKH has had a positive impact in reducing poverty levels in Abepura District, there are still several challenges in implementing the program, including problems with data accuracy, suitability of the program to local needs, as well as social and economic factors that influence the effectiveness of the program. **Conclusion:** Recommendations are prepared based on research findings to increase the effectiveness and sustainability of PKH in reducing poverty in the region.

Keywords: Evaluation, Poverty, Family Hope Program

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Distrik Abepura di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui bantuan finansial dan pendampingan. Meskipun program ini telah berjalan selama beberapa tahun, efektivitas dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Distrik Abepura belum dievaluasi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PKH di Distrik Abepura, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait program, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan PKH. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKH telah memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Distrik Abepura, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program, termasuk masalah akurasi data, kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas program. **Kesimpulan:** Rekomendasi disusun berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Kata kunci: Evaluasi, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang persisten di berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, masih terdapat banyak tantangan yang signifikan dalam memastikan bahwa terdapat keluarga miskin di berbagai wilayah Indonesia. Kemiskinan disebut sebagai permasalahan sosial yang membawa dampak bagi berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Masyarakat miskin sering mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, serta peluang pekerjaan yang stabil.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk miskin yang terbilang banyak, hampir mencakup seluruh wilayahnya. Beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, persentase penduduk miskin terbesar adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 26,55 persen. Hal ini tentu merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Papua sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan meluncurkan program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Murdiansyah (2014:72) salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Program Keluarga Harapan juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak langsung terhadap konsumsi) sekaligus meningkatkan investasi pada generasi mendatang melalui peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan anak. Dalam jangka

Panjang, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Kota Jayapura sebagai salah satu kota besar di Indonesia, kemiskinan juga masih menjadi masalah yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah. Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua dengan luas 940 Km². Bagian utara Kota Jayapura berbatasan langsung dengan Lautan Pasifik, bagian timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, bagian selatan berbatasan dengan Distrik Arso (Kabupaten Keerom), dan bagian barat berbatasan dengan Distrik Depapre (Kabupaten Jayapura). Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jayapura menjadi relevan dengan mengingat berbagai macam faktor yang terjadi seperti ketidaksetaraan akses terhadap Pendidikan dan layanan kesehatan serta rendahnya peluang ekonomi bagi keluarga miskin.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kesenjangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan PKH masih rendah, dan penggunaan dana bantuan sering tidak sesuai dengan tujuan program, yang sebagian besar diakibatkan oleh pemahaman yang kurang memadai. Kendala geografis dan minimnya infrastruktur memperburuk akses dan distribusi bantuan, sementara transparansi dan sistem pengawasan yang kurang efektif menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan penerima manfaat. Selain itu, pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program ini bervariasi, mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi.

Beberapa permasalahan ditemukan dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Distrik Abepura. Masalah utama yang diidentifikasi seperti rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat dari penerima manfaat yang rutin menghadiri pertemuan dan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Selain itu, sebagian penerima manfaat menggunakan dana bantuan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan program, seperti pembelian barang konsumtif serta keterbatasan jumlah pendamping PKH yang membuat pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan data menjadi kurang optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) maupun dalam konteks pengentasan kemiskinan. Penelitian Muhammad dan Marita yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun* (Muhammad & Marita, 2018) menemukan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sungai Asam umumnya Keluarga Penerima Manfaat menyatakan baik. Indikator-indikator evaluasi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan hasil dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Desty Febrian, (Wenny & Desty, 2019), menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum optimal dalam segi penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga banyak masyarakat yang

seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, yang dilakukan oleh Ade Kurniawan (Ade et.al., 2021), menemukan bahwa evaluasi pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang dinilai dari beberapa indikator evaluasi secara keseluruhan sudah memenuhi yaitu, efektifitas, kecukupan. Sedangkan indikator lainnya masih belum memenuhi yaitu efisiensi, perataan dan ketepatan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih ditemui beberapa kendala yaitu kurangnya Sumber Daya PKH, susah nya merubah cara pola pikir KPM, dan persebaran bantuan yang tidak merata. Penelitian Magfira Dan Erni yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Bantul (Magfira & Erni, 2022) , menemukan bahwa evaluasi PKH di Kabupaten Bantul berjalan cukup baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, pencairan bantuan, pemuktahiran data, dan verifikasi komitmen peserta PKH. Selain itu, PKH harus tetap berlanjut untuk kedepannya. Lalu proses pencairan bantuan harus ditingkatkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, proses pemuktahiran data harus ditingkatkan dan diperketat lagi mengingat masih ada peserta yang sudah mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Selanjutnya, diperlukan koordinasi dan pengawasan baik dari semua lembaga yang terkait maupun para penerima PKH agar tujuan dari PKH dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Resky Sirupang Kanuna yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Sopai Kabupaten Sopai Kabupaten Toraja Utara (Resky et al., 2022), menemukan bahwa bahwa pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diluncurkannya PKH yaitu dengan harapan mampu meningkatkan kualitas hidup peserta PKH lewat partisipasi dalam kesehatan dan pendidikan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya, yang berfokus pada konsep pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan memiliki keefektivan dalam mengurangi angka kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Selain itu, indikator yang digunakan juga berbeda yaitu dengan mengacu pada teori evaluasi oleh William N. Dunn (2003) yang menyatakan bahwa terdapat 5 indikator yang mempengaruhi dalam suatu evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan serta hambatan yang dialami pemerintah dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dalam Nasution (2023) secara garis besar, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif memiliki tiga komponen utama yang dikemukakan oleh Strauss, yaitu ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber – sumber yang paling umum digunakan,

dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur – prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori, dan 3 Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal – jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk – bentuk yang beragam bergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditunjukkan serta dengan mengacu kepada konsep teori evaluasi menurut William N. Dunn

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 5 orang informan yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Petugas Kantor Pos Kota Jayapura dan 2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun pengumpulan data kualitatif dilaksanakan dengan wawancara dan observasi langsung ke lapangan serta menganalisis menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn yang memiliki 5 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Distrik Abepura menggunakan teori dari William N. Dunn yang memiliki 5 indikator dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Efisiensi

Penulis menganalisis efisiensi dalam melaksanakan suatu kebijakan yang berarti menggunakan sumber daya yang tersedia dengan optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya yang minimal dan hal ini juga mencakup pengelolaan yang efisien terhadap waktu, uang, tenaga kerja serta infrastruktur yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Menurut Hamdi (2014 : 33) kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan perundang – undangan, barang – barang publik, dan pelayanan publik.

Partisipasi dan keterlibatan Masyarakat. Distrik Abepura pada tahun 2023 menerima sebanyak 3200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut hasil wawancara dan juga observasi di lapangan, terlihat bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima manfaat yang signifikan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dari wawancara dengan beberapa KPM, terungkap bahwa bantuan yang diberikan oleh PKH membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti Pendidikan anak-anak dan juga akses kesehatan. Observasi langsung di lapangan juga mengkonfirmasi bahwa KPM aktif mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah, yaitu seperti mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak usia 0-5 tahun untuk menyiapkan anak mereka untuk memasuki pendidikan dasar sehingga dapat melanjutkan pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA.

Manfaat yang dihasilkan. Dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) beberapa manfaat yang akan dihasilkan yaitu manfaat di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Manfaat ini yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.

Jumlah Anak Diimunisasi Distrik Abepura Tahun 2023			
Kelompok usia	Sasaran anak-anak	Anak diimunisasi	Persentase cakupan imunisasi
0-11 bulan	5000	4378	84
12-23 bulan	4500	3800	85
24-35 bulan	4000	3650	90

Sumber: Hasil pengolahan data di Distrik Abepura, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa cakupan imunisasi pada kelompok usia 0-11 bulan merupakan yang terendah, yaitu 84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak usia bayi ini yang belum mendapatkan cakupan imunisasi lengkap. Kemudian, cakupan imunisasi di Distrik Abepura pada kelompok usia 12-23 bulan dan 24-35 bulan lebih tinggi yaitu masing-masing 85 persen dan 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengimmunisasikan anak usia balita sudah cukup tinggi.

Dampak dan perubahan yang diinginkan. Menurut Akbar dan Mohi (2018:66) evaluasi merupakan penilaian terhadap pencapaian pekerjaan sejak pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan / program “selesai”, yaitu (1) pengertian waktu (mencapai / melewati ‘tenggat waktu’) dan (2) pengertian kerja (“pekerjaan tuntas”). Dalam Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Abepura Kota Jayapura, terdapat beberapa perubahan yang harusnya dilakukan, yaitu seperti peningkatan kualitas data dan informasi terkait dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Distrik Abepura untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kepala Kantor Pos Jayapura pada Senin, 15 Januari 2024 bertempat di lokasi penyaluran bantuan yang dilaksanakan langsung oleh Kantor Pos Jayapura dan berdasarkan hasil observasi peneliti, disimpulkan bahwa dalam proses penyaluran, pihak Kantor Pos sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan juga transparan sehingga proses penyaluran berjalan dengan baik.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik penerima bantuannya yaitu Kelompok program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga, atau rumah tangga, Program nasional dalam kelompok ini yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Program Beasiswa pendidikan untuk Keluarga Miskin (BSM)

3.2 Efisiensi

Efisiensi dalam melaksanakan suatu kebijakan berarti menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya yang

minimal, dan hal ini mencakup pengelolaan yang efisien terhadap waktu, uang, tenaga kerja, dan juga infrastruktur yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Dalam suatu kebijakan dianggap efisien jika mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efektif sehingga terlihat dampak yang maksimal terhadap masyarakat sesuai sasaran.

Efisiensi Administrasi. Efisiensi administrasi dapat berupa biaya administrasi program, jumlah staf yang dipekerjakan untuk mengelola program dan juga jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memproses pendaftaran dan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa kantor pos merupakan tempat penyaluran bantuan, mulai dari proses pendaftaran hingga penyaluran dan sangat dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan ketersediaan staf yang kompeten dalam memastikan kelancaran proses penyaluran bantuan dengan maksimal.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berfungsi sebagai basis data yang digunakan untuk menyeleksi dan menentukan calon penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya data yang terintegrasi dan akurat di Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga-keluarga yang benar-benar memenuhi syarat dan memerlukan bantuan tersebut.

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Yang Menangani Program Keluarga Harapan Di Kota Jayapura Tahun 2023

Januari	20
Februari	21
Maret	21
April	22
Mei	20
Juni	20
Juli	23
Agustus	20
September	20
Oktober	20
November	21
Desember	22

Sumber: Hasil pengolahan data Dinas Sosial Kota Jayapura, 2023

Dari tabel di atas telah disebutkan jumlah pegawai negeri sipil di Kota Jayapura dan menurut wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Pos, bahwa pencapaian target dapat dicapai dengan maksimal dan efisien jika pegawai sudah memadai dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah Pegawai Negeri Sipil dapat mempengaruhi proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif dan efisien. Jumlah KPM

yang dilayani setiap bulannya memerlukan pelayanan jauh melampaui kapasitas pegawai yang tersedia untuk menanganinya.

Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) mengukur seberapa puas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan beberapa aspek seperti manfaat yang dapat dirasakan, proses pendaftaran, pendampingan serta komunikasi dan tingkat kepuasan ini juga penting untuk di evaluasi karena menunjukkan efektivitas program yang dalam tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang puas dengan Program Keluarga Harapan (PKH) lebih cenderung memanfaatkan.

3.3 Kecukupan

Dalam Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), indikator kecukupan merupakan salah satu tolok ukur penting untuk menilai efisiensi program dalam mencapai tujuannya, yaitu membantu keluarga miskin keluar dari siklus kemiskinan. Kemudian indikator ini mencerminkan sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) ini mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara menyeluruh.

Alokasi yang memadai. Tersedianya anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh komponen Program Keluarga Harapan (PKH) serta penerapan sistem pendistribusian dana secara transparan dan akuntabel untuk memastikan dana yang digunakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa kantor pos Jayapura bertanggung jawab dan memiliki peran penting dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan kerja sama yang erat antara kantor pos dengan Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, berperan dalam memastikan efektivitas dan juga transparansi proses penyaluran tersebut.

Tingkat pengurangan kemiskinan. Tingkat pengurangan kemiskinan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi jumlah atau angka kemiskinan yang hidup dalam kondisi kemiskinan.

Tabel 3.

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KOTA JAYAPURA	
2021	11,39
2022	11,12
2023	10,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pengurangan kemiskinan dapat diukur dengan melihat perubahan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari waktu ke waktu sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Jayapura menurun dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat

pengurangan kemiskinan, maka upaya-upaya yang sudah dilakukan melalui program-program memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

3.4 Perataan

Perbandingan kondisi antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan non Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilihat dari pendapatan serta kesejahteraan dan kondisi hidup. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki pendapatan lebih rendah dari non-KPM. Mereka bergantung pada Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara non-KPM memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam. Kemudian, KPM juga cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dan mungkin beresiko untuk mengalami masalah seperti anak-anak yang putus sekolah dan tingkat imunisasi yang masih rendah. Non-KPM biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan yang mendukung kesejahteraan serta kualitas hidup yang lebih baik.

Jumlah penerima manfaat pada tahun 2024 sebesar 25.980 Keluarga di Kota Jayapura dan hal ini menunjukkan peningkatan 15 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 12.789 penerima manfaat. Kemudian untuk alokasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), total anggaran di tahun 2024 yaitu sebesar Rp 57.558.000.000. dana ini dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk transfer tunai di setiap bulan.

3.5 Responsivitas

Pada pasal 1 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah, pengelola yang mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan, dan merupakan pejabat berwenang di daerah otonom. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengelola yang mengurus urusan di pemerintahan harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Program Keluarga Harapan juga harus memiliki mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk menangani pengaduan dan keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses dan membangun sistem layanan pengaduan yang terus aktif untuk melayani. Akuntabilitas program mencakup kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan program dengan transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Ini melibatkan pelaporan yang jelas dan teratur tentang penggunaan dana, pencapaian tujuan program, serta responsif terhadap masukan dan keluhan dari penerima manfaat dan masyarakat secara umum.

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Jayapura, bahwa dilakukan Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai manajemen keuangan pribadi dan pengelolaan usaha kecil. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan di bulan April 2023 dan diadakan di Kantor Distrik Abepura. Pelatihan dan sosialisai ini diikuti oleh 40 Keluarga Penerima Manfaat. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan penyampaian materi tentang manajemen keuangan pribadi dan usaha kecil, diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan strategi, studi kasus untuk menganalisis situasi keuangan yang umum dihadapi, permainan peran untuk mensimulasikan tantangan dalam pengelolaan usaha, hingga latihan praktis dalam pembuatan

anggaran dan penggunaan perangkat lunak pembukuan. Sesi tanya jawab juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan klarifikasi atas konsep yang kurang dipahami.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Abepura berjalan dengan baik dan berhasil mencapai banyak keluarga miskin yang membutuhkan. Program ini memberikan bantuan finansial yang signifikan dan berbagai pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial penerima manfaat. Namun, tantangan seperti keterlambatan distribusi bantuan dan kendala administrasi masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Secara keseluruhan, PKH telah berkontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan.

Sama halnya dengan penelitian di Distrik Abepura, penelitian di Desa Sungai Asam juga menemukan bahwa PKH efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga penerima manfaat. Namun, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi bantuan. Berbeda dengan temuan di Distrik Abepura, penelitian di Nagari Tanjung Bungo menemukan bahwa keterlambatan distribusi bantuan menjadi kendala utama. Meskipun demikian, dampak positif terhadap pendidikan dan kesehatan anak penerima manfaat tetap signifikan. Sama halnya dengan penelitian di Distrik Abepura, penelitian di Kecamatan Karawang Barat menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan keterampilan penerima manfaat dalam mengelola keuangan. Berbeda dengan temuan di Distrik Abepura, penelitian di Kabupaten Bantul menemukan bahwa tingkat literasi yang rendah di kalangan penerima manfaat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Meskipun begitu, bantuan PKH berhasil meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Sama halnya dengan penelitian di Distrik Abepura, penelitian di Kecamatan Sopai juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup penerima manfaat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan secara efektif.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, kontribusi diperlukan dari pemerintah, ASN serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada hambatan seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terampil yang dapat mempengaruhi penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga, Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum mencapai target maksimal karena dinamika yang terjadi di lapangan. Keterbatasan tenaga kerja yang terlatih dan terampil untuk melaksanakan program dengan efektif dan efisien. Dengan keterbatasan yang ada ini, dapat menghambat dan memperlambat proses penyerahan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga tidak efisien dan menjadi penghambat dalam menyediakan layanan yang berkualitas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat William N. Dunn

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Abepura untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Distrik Abepura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*.

https://www.researchgate.net/profile/Muh-Akbar-5/publication/324079382_Studi_Evaluasi_Kebijakan_Evaluasi_Beberapa_Kebijakan_di_Indonesia/links/5abc7aeeca27222c7537bff/Studi-Evaluasi-Kebijakan-Evaluasi-Beberapa-Kebijakan-di-Indonesia.pdf

Badan Pusat Statistik. (2019). *Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*

Badan Pusat Statistik, (2023). *Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura Tahun 2023*

Febrian, W. D., et al. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota*.

<https://www.semanticscholar.org/paper/EVALUASI-PELAKSANAAN-PROGRAM-KELUARGA-HARAPAN-%28PKH%29-Ilo/06cfefa12610ff6ce3c1b64b745f0c78a89c5bde>

Irnayanti, A. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali*.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3443693&val=29981&title=Evaluasi%20Kebijakan%20Program%20Keluarga%20Harapan%20di%20Kelurahan%20Ulunambo%20Kecamatan%20Menui%20Kepulauan%20Kabupaten%20Morowali>

Magfira, & Saharuddin, E. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul*.

<https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/273>

- Muchlis, H. (2015). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Novita, T., & Noverman. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Murdiansyah, Isnan., (2014). *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)*. Skripsi STIE Widya Gama.
- Nasution, Abdul Fattah.(2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Harva Creative.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Razali, M. T. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun*.
<https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IAN/article/view/30>
- Sirupang Kanuna, R., et al. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara*.
<https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/7>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.